

PILKADA, DINASTI POLITIK DI ERA DESENTRALISASI
(STUDI TENTANG HABITUS AND FIELD, AKTOR POLITIK
DALAM KONTESTASI PILKADA KAB. BANGKALAN
YANG MELAHIRKAN DINASTI POLITIK)

Yudhi Rachman

Abstract

This Thesis attempts to capture the power developed in an area aftermath of reformation era in 1998 marked by implementing autonomous region or decentralized. Power in The New Order Regime, that was The Centralistic changed with the emergence of the local political elite that affirming their power by various sources of capital.

By having a more open space for local figures to snatch the seat of power at the local level in the county, political competition then became closer in social community base level. Those who have a culture of social capital, networks and other social networking might be easier to perform. No exception figure of “Kiai” head of Islamic community originating from habitus religious activities and education in boarding school and other community social activities.

In Bangkalan regency Habitus-based Political Elite Kiai boils down to descendants of the BaniKholildiasporic in various organizations either initiating Community-Social Organizations, political parties and legislative Institutions and Executive.

The method used in this research is descriptive-qualitative structure of Agency Bourdieu's approach with data mining using in-depth interviews and technical documentation.

The end result of this thesis was to see that the political and Dynastic Politics Breeds successfully built by RKH Fuad Amin during his leadership in two periods, ten years later continued by the winning of his son MakmunIbnuFuad with a majority of votes 93,47 percent. After his main rival who is also a descendant of BaniKholil, namely KH Imam BuchoriKholil failed to follow the contestation elections directly.

In contestation elections in Bangkalan Regency, the ability of the group or Political Actor in using sources of capital and symbolic power in a society is still very effective in managing their Paternalistic room practices. In the analysis of Structure-Agency Bourdieu's perspective,

social space and social groups who control it are the products of a historical struggle continuously updated for contested or won as well as establish dominance in power.

Keywords: Habitus and Field Actors of politics, elections, Political Dynasty

Pendahuluan

Otonomi Daerah dan Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia pasca reformasi tahun 1998 ternyata belum mensejahterakan rakyat. Itu terjadi akibat akses sumber daya ekonomi masih dikuasai elite politik dan pengusaha. Kelompok masyarakat sipil belum benar-benar mandiri dan terlibat dalam pengambilan kebijakan

Hal itu mengemuka dalam diskusi dan peluncuran buku Indeks Masyarakat Sipil di 16 Kabupaten/Kota yang digelar Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) di Jakarta, Selasa (6/12). Pembicara dalam diskusi itu adalah Ketua Pengurus Yappika Lili Hasanuddin dan Kepala Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Ani Sucipto. Lili mengungkapkan, desentralisasi dan demokratisasi di daerah di Indonesia masih sebatas menimbulkan keriuhan politik. Masyarakat semakin bebas mengekspresikan diri dan menuntut kesetaraan politik. Namun, akses ke sumber daya ekonomi masih digenggam elite politik dan elite pengusaha.

Secara bersamaan, tanggung jawab pemerintah lokal untuk menyejahterakan masyarakat juga masih rendah. Kelompok masyarakat sipil yang berdaya kemudian beralih aktif di partai politik sehingga masuk dalam lingkaran elite kekuasaan. "Akibatnya, Desentralisasi riuh rendah, tetapi masyarakat belum sejahtera. Sumber daya masyarakat sipil di daerah juga masih kurang," katanya. Hal ini adalah salah satu kesimpulan dari penelitian indeks masyarakat sipil di 16 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Secara umum, kesetaraan politik masyarakat sipil membaik, tetapi kesadaran lingkungan dan sumber daya masyarakat sipil masih rendah.

Ani Sucipto menilai, partisipasi masyarakat sipil, termasuk kaum perempuan, di daerah masih bersifat prosedural dan belum substansial. Ruang partisipasi memang terbuka, tetapi belum benar benar dimanfaatkan untuk menjalankan substansi aspirasi masyarakat dalam kebijakan. Gerakan masyarakat sipil belum punya posisi tawar dalam kompetisi politik.

Masyarakat tak kebagian sumber daya karena dikuasai elite. Pemberdayaan masyarakat harus diperjuangkan. (Kompas, 7 Desember, 2011:2)

Pada dasarnya membicarakan Politik lokal dan Otonomi Daerah adalah membicarakan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Karena membicarakan dua entitas dalam dua level yang berbeda ini merupakan inti untuk mengukur praktik otonomi, dimana hubungan tersebut juga dapat mengungkapkan kedudukan dan otoritas masing – masing skop pemerintahan. Otonomi secara etimologi berasal dari kata auto dan nomos yang berarti sendiri dan peraturan atau perintah. Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan) tersendiri, atau menurut Riant Nugroho, berarti ‘ memerintah sendiri’. (2000 : 46)

Walaupun pelbagai kebaikan dapat hadir melalui kebijakan otonomi, namun beberapa implikasi negative selalu ada. Misalnya, penyalahgunaan kekuasaan oleh elit local sentralisme politik local (sehingga menghadirkan para local strongmen atau greatmen), berkembangnya politik patron klien di daerah, menyebarnya kasus KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di level local, perampokan kekayaan daerah baik berupa uang cash maupun dalam bentuk sumber daya lainnya. Inilah yang disebut sisi gelap dari pelaksanaan otonomi daerah, dikatakan demikian karena otoritas politik berpotensi memotivasi elit local untuk melakukan penyelewengan bagi kepentingannya atau kelompoknya dan bukan demi “kebaikan bersama” seperti yang dicitakan oleh spirit Desentralisasi sendiri. (Dalam Leo Agustino. 2011 : 13)

Bagaimana dengan fenomena munculnya dinasti politik atau Praktik politik kekerabatan atau dinasti yang marak terjadi di sejumlah daerah dinilai merusak demokrasi. Pasalnya, politik dinasti bisa menutup akses dan kesempatan bagi warga negara yang lain untuk memperoleh hak politik, terutama hak untuk dipilih. Pendapat itu disampaikan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, R Siti Zuhro, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/2). Menurut dia, politik dinasti yang marak terjadi di sejumlah daerah sudah mengkhawatirkan. Jika dibiarkan, tatanan demokrasi akan rusak. ”Politik dinasti ini merusak demokrasi,” katanya menanggapi maraknya politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah. (Kompas, 23 Februari, 2013)

Hal senada juga dinyatakan salah seorang dosen IPDN Umar Syadat Hasibuan dalam tulisannya yang berjudul “ Ambang Batas Dinasti Politik “ Sudah saatnya kita belajar dari dampak negatif dinasti politik di sejumlah negara. Pada masa Orde Baru, dinasti politik telah

menjadi "momok" dan diyakini menjadi penyebab utama maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Data dari Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi ada 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik di beberapa daerah di Indonesia (2013). Dari 57 kepala daerah yang mencalonkan para anggota keluarga yang memiliki pertalian darah, hanya 17 di antaranya yang kalah di arena pilkada. Selebihnya, mereka menjadi pemenang menggantikan kekuasaan keluarganya. (Kompas, 11 April 2013).

Praktik seperti ini memberi pengaruh tidak baik pada pembangunan Sosio – Politik dan Sosio ekonomi suatu Negara karena peluang Politik dan Ekonomi setiap warga Negara menjadi amat terbatas. Bukan hanya dapat terbatas, peluang – peluang itu juga diasumsikan akan di monopoli oleh penguasa dan kelompok – kelompok (Keluarga, saudara, dan kerabat) yang dekat dengan pemegang kekuasaan. selain itu amalan ini juga bukan saja memastikan seseorang dapat memonopoli sumber- sumber ekonomi dan politik tetapi juga memudahkan mereka mendapatkan tempat atau kedudukan dalam kekuasaan dan menggunakan sumber politik dan ekonomi pada tataran lebih luas, hal demikianlah yang dapat mencetuskan lahirnya dinasti politik.(Leo Agustino, Dinasti Politik Pasca Orde Baru, Prisma Vol 29. No 3, Juli 2010 : 103)

Secara Sosiologis realitas tersebut merupakan bentuk atau cara suatu kelompok kepentingan untuk mengamankan posisi- posisi mereka, menurut Pierre Bourdieu hal tersebut merupakan suatu bentuk sisi gelap modal sosial, " Modal hubungan sosial yang jika diperlukan akan memberikan dukungan - dukungan bermanfaat : modal harga diri dan kehormatan yang seringkali diperlukan jika orang ingin menarik para klien ke dalam posisi- posisi yang penting secara sosial dan yang bisa menjadi alat tukar, misalnya dalam Karir Politik" (Bourdieu, 1977: 503)

Modal sosial sebagai bagian dari nilai kehidupan sosial, jaringan, norma dan kepercayaan yang mendorong hadirnya partisipasi bertindak bersama-sama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama menjadi tereduksi hanya untuk mencapai kepentingan politik praktis di tataran elit politik dan jaringan oligarkisnya.

Rumusan Masalah

Melihat fenomena tersebut diatas, permasalahan yang diangkat pada tulisan ini adalah, Faktor – faktor apa sajakah yang mendorong hadirnya Dinasti Politik dalam percaturan politik

lokal di Era Desentralisasi atau Otonomi Daerah saat ini di Kabupaten Bangkalan serta bagaimana Aktor Politik selaku Agen Sosial mempengaruhi Proses Demokrasi melalui pelaksanaan Pilkada sebagai representasi ranah praktik kontestasi suksesi Kekuasaan dilihat dari Perspektif Sosiologi Agen-Struktur Bourdieu.

Pembahasan

Struktur Sosio Politik dan Historis Kabupaten Bangkalan

Kota Bangkalan adalah Kota Tua yang kelahirannya berakar pada Pengislaman Madura abad ke-16. Kota Bangkalan adalah pusat sebuah budaya, dekat tetapi berbeda dengan budaya Jawa. Morfologi sebuah kota Jawa dapat dikenali disini dengan Istana, alun – alun , Masjid dan Kampung Cina (Kuntowijoyo, 1993:45).

Istana Raja terletak di timur alun- alun, tetapi kini telah punah, setelah dimusnahkan pada zaman Kolonialisme Belanda. Masjid Jamik Bangkalan yang dibangun semasa pemerintahan Sultan Abdul Kadirun terletak disebelah barat Alun – Alun. Sementara itu, Kampung Cina terletak disebelah utara Alun- alun. Masyarakat Cina yang telah menyatu dengan masyarakat Bangkalan menguasai bisnis eceran yang selama ini menghidupi kebutuhan sehari-hari warga Bangkalan.

Dalam kondisi demikian lahirlah Pondok Pesantren Syaikhona Kholil. Pesantren ini terletak tepat di jantung Kota Bangkalan di sebelah selatan Masjid Jamik Bangkalan. Tepatnya di Demangan Barat. Pesantren terbesar di Bangkalan ini didirikan pada tahun 1875 oleh KH Syaikhona Mohammad Kholil, Syaikhona Kholil lahir sekitar Tahun 1883-1834 dan wafat persis setahun sebelum lahirnya organisasi NU (Nadlatul Ulama), yakni pada tahun 1925.

Dari garis keturunan ayah Syaikhona Kholil merupakan keturunan Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah), salah seorang Wali Songo yang menurunkan KH Khotim dan KH Hamim. KH Khotim menyebarkan Islam sekaligus mendirikan Pesantren Sidogiri , sedangkan KH. Hamim adalah kakek Syaikhona Kholil yang turut menyebarkan islam di Bangkalan (Habib :27)

Seperti di tulis oleh Mien rifai, Ajaran Islam masuk pelan-pelan sekitar abad -19 tetapi penerimaannya secara luas kemudian mengubah semuanya. Derajat keislaman disejajarkan dengan orang Aceh dan Minang di Sumatera , Sunda di Jawa dan Bugis di Sulawesi. Menjelang akhir abad ke -19 di Desa Kademangan (dekat kota Bangkalan) sudah berdiri sebuah pesantren besar dibawah asuhan Kyai Haji Khalil (Rahman 1999). Pesantren yang sangat tersohor secara

nasional karena santri-santri yang dididiknya kemudian menjadi tokoh pemimpin pesantren besar di pelbagai tempat yang amat terkenal serta berpengaruh luas (Dhofier 1982) santri hasil gembengan pesantren kademangan Madura itu antara lain adalah Hadratus Syeh KH Hasyim Asyari (Tebuireng), KH Manaf Abdul karim (lirboyo Kediri) KH mohammad Sidik (jember) KH Bisri syamsuri (Jombang) KH Munawir (Krapyak, Yogyakarta) KH Maksum Lasem, KH Wahab Hisbullah (Jateng) agaknya tidak mungkin akan ada sebuah perguruan keagamaan yang disegani dan berdampak besar serta luas seperti pesantren kademangan itu kalau keadaan keislaman masyarakat Madura saat itu tidak mendukung. Dapatlah dimengerti jika pada saat kejayaannya di perempat pertama abad ke- 20, Syarikat Islam sebagai gerakan politik berlandaskan islam berkembang sangat pesat di Madura (Korver 1985). (Mien Ahmad Rifai, Manusia Madura, 2007, Pilar Media (Anggota IKAPI) Hal : 43)

Organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama di kabupaten Bangkalan lahir dan besar dilingkungan Bani Kholil . dalam struktur organisasi , nama beberapa Kiai Bani Kholil tercatat sebagai koordinator dan pengurus. Sebagai contoh dalam masa bhakti 2001-2005, Ketua Syuriah NU Bangkalan berada ditangan KH Abdullah Schall , pengasuh PP Syaikhona Kholil I, sementara Ketua Tanfidiyah NU di jabat KH, Syafiik Rofii yang tak lain Ketua DPRD TK II Bangkalan, dan Ketua PCNU Bangkalan dijabat KH, Imam Buchori Kholil. Organisasi Basra (Badan Silaturahmi Ulama Madura) juga juga lahir dan besar di lingkungan Bani Kholil .

Semenjak angin reformasi berembus ke Madura yang ditandai dengan menjamurnya Partai Politik, Kiai – Kiai Bangkalan, termasuk Para Kiai Bani Kholil menyalurkan aspirasi politiknya ke Partai kebangkitan Bangsa (PKB) . Di Bangkalan, PKB mengisi 25 kursi dari 45 kursi yang ada, bahkan Ketua DPRD Bangkalan yang berasal dari PKB juga di jabat orang Basra yaitu (KH Syafik Rofii. Disamping itu Basra Bangkalan memiliki dua LSM yakni LSM Madura Mandiri dan LSM GMH (Gerakan Madura Hijau) yang seringkali dilibatkan dalam proyek-proyek Basra. Ketua LSM Madura Mandiri adalah KH Mondir Rofii ST (Adik kandung KH Syafik Rofii), sementara salah seorang pembina LSM GMH adalah KH. Imam Buchori Kholil SH.

Kondisi ini tak pelak menjadikan Kiai Bani Kholil dengan semua organisasi yang dibinanya (NU, Basra dan PKB) sebagai kelompok dominan. Tak seorang pun memungkirinya bahwa Bani Kholil adalah Keluarga Kiai paling terkenal dan paling berpengaruh di Bangkalan. Mereka mendapat penghormatan tertinggi dari masyarakat Bangkalan dan sekitarnya. Lebih

jauh, kedudukan Kiai Bani Kholil didukung dua sekutunya : Birokrat- Legislatif dan Blater. Birokrat – Legislatif adalah koalisi Bupati Bangkalan dengan beberapa Kiai Bani Kholil yang duduk sebagai anggota Dewan. Di samping dengan beberapa Birokrat-Legislatif , Kiai Bani Kholil juga menjalin hubungan khusus dengan Blater. Blater seringkali dimanfaatkan untuk menekan pihak-pihak yang dapat menghalangi tujuan Kiai. (Mutmainnah Munir. 2005 : 227)

Dalam kondisi kekuasaan yang terpusat pada Kiai Bani Kholil yang mendapat dukungan Birokrat – Legislatif dan Blater inilah Budaya Politik yang berkembang adalah Otoritarianisme. Istilah ini menunjuk pada suatu keadaan saat kekuasaan yang besar menggumpal pada satu orang atau kelompok yang memungkinkan baginya untuk mendominasi segala proses pengambilan keputusan. (Mutmainnah Munir, Kiai Dan Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, Madura Dalam Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2005 : 228)

Desentralisasi dianggap sebagai gejala yang wajar dari sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Proses semacam itu merupakan kecenderungan yang tak terhindarkan dari demokrasi politik yang menghendaki adanya perluasan partisipasi dan pemberian otonomi bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia pasca pemerintahan Suharto, desentralisasi yang muncul bersamaan dengan Reformasi 1998 itu menjadi salah satu unsur pembeda paling elementer dibanding era Orde Baru. Struktur ekonomi politik Orde Baru yang tertutup dan terpusat segera berubah dan berganti menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi.

Desentralisasi tidak saja telah menjadi “kata kunci” dalam perumusan kebijakan public saat ini, tetapi juga menjadi “Mantra Suci” dalam dunia politik. Agaknya, terdapat semacam kesamaan cara pandang di kalangan mereka yang menamakan diri “kaum reformis” bahwa upaya mewujudkan demokrasi pasca-Suharto memerlukan pembukaan ruang lebih luas bagi tumbuhnya prakarsa masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.fenomena yang menarik adalah munculnya elite politik local baik yang telah lama berkecimpung di era orde baru dan mampu bertahan dan beradaptasi dengan sistem politik yang relatif lebih demokratis saat ini atau yang muncul setelah ada peluang atau opportunity Melalui kerangka kelembagaan baru di era Reformasi yakni, Partai Politik, Pemilu Lokal, Parlemen dan Desentralisasi Pemerintahan kelompok-kelompok dominan dengan cepat melakukan penataan diri kembali dan tetap memiliki akses sangat kuat terhadap proses politik dan akses sumber – sumber ekonomi-politik. Disini penulis ingin mengetahui bagaimana elit politik sebagai agen

sosial mewarnai dunia sosialnya lewat panggung politik praktis di era Desentralisasi dengan perspektif Otoritas Kharismatik Weberian dan Agen Struktur Bourdieuan :

Habitus Elite Politik

1. RKH Fuad Amin

Dalam satu dasawarsa terakhir ini , RKH Fuad Amin Imron merupakan tokoh sentral di Bangkalan Madura, baik dikalangan tokoh formal maupun non formal dalam diri tokoh yang sepuluh tahun memimpin bangkalan. Tersimpan potensi dan berbagai karakter seperti sebuah pertunjukan, beliau mampu memerankan *Lakon* dengan beragam karakter tokoh diatas panggung kehidupan yang sarat dengan peristiwa teatrical. Keberagaman potensi yang dimilikinya ini telah ditransformasikan secara elegan dalam kepemimpinan birokrasi yakni sebagai Bupati Bangkalan.

Potensi ini terbentuk karena dua factor yang selama ini melekat dalam dirinya , baik dalam perspektif internal maupun eksternal. secara internal, dapat dikatakan bahwa (hampir) semua orang tidak akan mempertanyakan latar belakangnya. factor geneologis dari nama besar Syaikhona Kholil yang menempel ke dalam dirinya, sedangkan secara eksternal adalah proses ketokohan seseorang tidak serta merta lahir karena factor geneologis semata. Oleh karena itu ia mengikuti proses natural dari proses pendidikan, berorganisasi, bekerja dan bergaul dengan berbagai kalangan dan sebagainya merupakan upaya eksternal yang dilakukan sebelumnya.

RKH Fuad Amin Imron lahir di Bangkalan 1 September 1948. Kelahiran anak laki-laki dari keluarga amin ini memang sangat diharapkan keluarga dan masyarakat. Karena masyarakat Madura menganut tradisi patrilineal dalam mengatur alur keturunannya.seperti lazimnya tradisi kerajaan atau bahkan tradisi kepemimpinan di pesantren, anak laki-laki merupakan generasi penerus dan calon pengganti yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan setelah sang raja atau sang kyai wafat.

Karir politiknya di mulai sejak terpilih menjadi ketua DPC PPP Bangkalan menggantikan posisi ayahnya. Terjun ke politik praktis sesungguhnya bukan pilihannya tapi karena permintaan ayahnya Kyai Amin Imron yang merupakan dedengkot PPP Bangkalan dan anggota DPR RI di era orde baru. Kyai Amin imron disebutnya sebagai guru politiknya yang pertama kali mengenalkan dirinya kepada dunia politik, khususnya politik praktis. (Sang Pemimpin, 2012 : 317)

RKH Fuad amin menjadi Bupati Bangkalan sejak terpilih melalui mekanisme pemilihan suara di DPRD untuk periode 2003 - 2008 dengan diusung oleh PKB dan berpasangan dengan Muhammadiyah dari PDIP. PKB yang merupakan Fraksi mayoritas di parlemen dengan rincian FKB 25 kursi dan FPDIP sebanyak 7 kursi , sementara calon bupati yang lain Ir H Sulaiman dan Sunarto BA diajukan oleh FPAU. Kemenangan RKH Fuad Amin didukung hampir mayoritas anggota parlemen dengan jumlah total 42 suara dengan demikian mendapat tambahan 5 suara dari fraksi TNI/Polri dan FPAU sebanyak 5 suara.

Di Kabupaten Bangkalan Pilkada langsung dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tanggal 23 Januari 2008. Setelah melalui serangkaian tahap pencalonan di internal PKB akhirnya DPP PKB merekomendasikan dan menetapkan nama RKH Fuad Amin Imron sebagai calon bupati dan KH drs H M syafik Rofii sebagai calon wakil bupati tahun 2008-2013 untuk kemudian diteruskan kepada KPUD.

Pilkada langsung di kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2008 diikuti oleh tiga pasang kandidat , yaitu pasangan dr Abdul Hamid Nawawi – H Hosyan Muhammad diusung oleh PPP dengan nomor urut 1. Pasangan Ir H Muhammadiyah – KH Razak Hadi diusung oleh gabungan Partai Demokrat Dan PDIP dengan nomor urut 2. Serta pasangan RKH Fuad Amin Imron – KH Drs M Syafik Rofii'I diusung oleh PKB dengan nomor urut 3.

Hajatan politik masyarakat bangkalan kali ini merupakan kali pertama dimana pemilihan bupati dan wakil bupati dipilih secara langsung oleh masyarakat, sementara Pilkada sebelumnya dipilih oleh DPRD . oleh karena itu, legitimasi politik dari hasil pilkada ini diharapkan akan semakin kuat sehingga proses pembangunan di Bangkalan akan berjalan lebih baik karena dukungan dan partisipasi politik masyarakat akan diprediksikan juga akan lebih berkualitas.

Kemenangan pasangan RKH Fuad Amin Imron dan KH. M Syafik rofi'I dalam pilkada akhirnya menjadi kenyataan . dari total suara sah yang masuk, sebesar 462.210 ribu suara , pasangan RKH Fuad Amin Imron dan Syafik Rofii'I dapat menyisihkan dua pasangan calon lainnya. Total perolehan suara pasangan RKH Fuad Amin Imron dan KHM . Syafik Rofii'I sebesar 373.422 ribu suara atau 80,79 persen sedangkan pasangan muhammadong – KH Razak Hadi meraih 71.584 suara atau 15,49 persen , sementara pasangan Abdul Hamid Nawawi – Hosyan Muhammad mendapat 17.204 ribu suara atau 3,72 persen.

Pengalaman KH Fuad Amin serta kedudukannya dalam tradisi masyarakat santri Bangkalan, sangatlah menentukan keberhasilan politiknya yang menempatkannya mempunyai relasi. Sehingga mengantarkan KH Fuad Amin sebagai Bupati Bangkalan. Dengan Dukungan penuh para Kiai dalam pemerintahan Kabupaten Bangkalan serta ikatan primordialisme yang ikut mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilihnya untuk maju kembali dan memenangkannya pada Pilkada 2008.

Dalam kaitan ini RKH Fuad Amin Imron tidak mengalami kesulitan , pasalnya secara geneologi beliau merupakan bagian dari kyai itu sendiri . seperti dijelaskan sebelumnya, Bupati bangkalan ini adalah cicit syaikhona Kholil yakni seorang Ulama yang menjadi guru bagi umumnya kyai-kyai yang berlatar belakang NU. factor inilah yang menjadi salah satu kunci kemenangannya. Selain peran kyai, terpilihnya RKH Fuad Amin dalam Pilkada 2008 juga karena didukung oleh beragam simpul massa yang ada di masyarakat . sejumlah tokoh masyarakat juga menjadi salah satu factor kunci bagi kemenangannya, sebut saja komunitas Blater yang sejauh ini memiliki kedekatan batin dengan beliau.

Mayoritas dari mereka memback up penuh Kyai Fuad dalam pencalonan Bupati. Lalu jajaran birokrasi hingga ke pelosok desa dan kelurahan juga ikut memberikan dukungan penuh kepadanya. Bahkan mereka secara diam-diam justru menjadi mesin politik yang cukup efektif dalam mengawal, mengantarkan dan mengamankan RKH Fuad Amin Imron pada jabatan Bupati Bangkalan untuk kali yang kedua ini. Komunitas lain yang juga ikut memberikan dukungan kepada kiai Fuad antara lain Ormas. OKP , LSM , Paguyuban dan lembaga2 sejenis lainnya. (Sang Pemimpin , 2012 : 213- 214)

Pada pemilu 2012 setelah tidak bisa mencalonkan lagi sebagai Bupati Bangkalan, RKH Fuad Amin berupaya meneruskan dinasti politiknya dengan mencalonkan anak laki-lakinya.

2. Makmun Ibnu Fuad .

Pemuda berusia 25 Tahun yang duduk sebagai anggota DPRD Kab Bangkalan dari fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) dengan di dukung penuh oleh PKB. PPP, HANURA dsb dan hampir sebagian besar parpol yang ada di Kab Bangkalan Ra Momon sapaan akrabnya mantap maju bersama KH Mondir Rofi'I yang biasa di panggil Ra Mondir pengusaha sekaligus ketua salah satu LSM Madura Mandiri di kab Bangkalan.

Dalam salah satu majalah terbitan sebagai media kampanye pasangan penerus RKH Fuad Amin ini mengusung tema “Pemimpin Muda Pilihan Rasulullah SAW” dikemas dengan sangat

menarik diketengahkan silsilah keturunan Ra Momon sebagai anak Bupati RKH Fuad Amin sampai pada Syaikhona Kholil Ulama legendaris di Pulau Madura. Berikut dukungan beberapa Ulama besar di Jawa Timur dan para pendukungnya di Kabupaten Bangkalan. Serta aktivitasnya blusukan ke pelosok2 desa terpencil di Kabupaten Bangkalan untuk mengenalkan diri dan membagi- bagikan sembako.

3. KH Imam Buchori Kholil SH

Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Syaikhona cholil 2 . kyai muda ini mempunyai pengalaman organisasi antara lain Ketua PCNU Bangkalan 1996-2007, Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB 1998-2008, Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan 2001– sekarang, anggota DPR RI 2003-2008, Wakil Ketua Dewan Syuro DPW PKNU Jawa Timur 2007 d a n Wakil DPW PPN Jawa Timur 2011.

Pilkada Representasi Elit Politik (Habitus X Modal) + arena = Praktik.

Ranah :

Agen tidak hidup di ruang kosong; ia selalu terlibat dalam dunia sosial. Jika habitus adalah sejarah yang menubuh dalam agen, maka dunia sosial adalah sejarah yang diobjektifikasi dalam benda dan institusi, “dalam bentuk struktur dan mekanisme” (Bourdieu 2002: 151). Praktik dihasilkan dari pertemuan antara dua sejarah ini: sejarah dalam tubuh dan sejarah dalam dunia. “Tubuh berada dalam dunia sosial, tapi dunia sosial juga berada dalam tubuh,” dalam bentuk habitus (Bourdieu 2002: 152).

Dari perspektif ranah Bourdieu tersebut penulis ingin mengetengahkan bagaimana para agen atau aktor politik dengan segenap modal yang dimilikinya tersebut merepresentasikan eksistensi dirinya, memperebutkan posisi dalam ranah politik praktis dimana dalam era Desentralisasi ini di manifestasikan dalam kontestasi Pilkada.

Makmun ibnu fuad sebagai calon yang didukung oleh ayahnya selaku Bupati Bangkalan dengan track record seperti yang disebutkan diatas mematangkan berbagai modal yang dimilikinya . di dukung oleh mayoritas partai politik yang ada diantaranya PKB, PAN , PDI P, Partai Demokrat dan lainnya.

Modal :

Bourdieu menjelaskan modal sebagai “kerja yang terakumulasi (dalam bentuk terbedakan atau menubuh) yang, jika dimiliki secara privat, yakni secara eksklusif, oleh agen atau sekelompok agen, memungkinkan mereka memiliki energi sosial dalam bentuk kerja yang direifikasi maupun yang hidup” (Bourdieu 1986: 241), atau dengan kata lain, “sekumpulan sumberdaya dan kekuasaan yang benar-benar dapat digunakan” (Bourdieu 1996: 114). Modal yang dimiliki seseorang akan menentukan posisinya dalam struktur ranah dan juga kekuasaan yang dimilikinya. Dengan kata lain, modal adalah “*Prinsip Diferensiasi*” dan “*Prinsip Hierarkisasi*” yang berlaku dalam setiap ranah (Bourdieu 1995a: 245). Secara umum, Bourdieu membedakan empat jenis modal: ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Meski berbeda, keempat bentuk modal ini bisa saling dikonversikan dan diwariskan pada orang lain dengan nilai tukar dan tingkat kesulitan yang berbeda. Masing-masing jenis modal ini didapat dan diakumulasi dengan saling diinvestasikan dalam bentuk-bentuk modal lain (Bourdieu 1986: 243).”

Dalam proses kampanye bisa dilihat bagaimana kontestasi bermuara pada kedua bakal calon Bupati dan wakil Bupati dengan modal sosial dan kultural yang dimilikinya yaitu sama-sama keturunan dari Syaikhona Kholil.

Dalam sebuah video diunggah di You Tube berjudul “Bupati Ra Momon” di tampilkan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin dalam sebuah acara, dengan gayanya yang humoris di depan para Kyai, Ustadz dan masyarakat pedesaan di salah satu kecamatan di Kabupaten Bangkalan Bupati RKH Fuad Amin memperkenalkan anaknya Ra Momon dan Ra Mondir sebagai Calon Bupati dan wakil bupati Bangkalan. Dalam bahasa Madura disampaikan

“ Perkenalagih panekah anak kaule ra momon ..kompoyyah kyai amin (ayah dari RKH Fuad Amin yang terkenal sebagai ulama dan politisi yang terkenal di Kab Bangkalan di eranya) kemudian memperkenalkan calon wakil Bupati Ra Mondir panekah Ra mondir..Kakeknya ra mondir ini ya kakek saya ujar Fuad ..oreng delem sadejeh tapi prosedural ..perkarah bedeh oreng laen se acalon agih kauleh tak lang alangah” ...diakhir pidato fuad menyatakan “ yo'on keeserragih dek rakyat sadejeh..pelehan bupati nekah epele sareng rakyat ban ditakdirkan sareng Guste Allah..kuncinah ekeneserreh rakyat ee kesenengeh rakyat..edaulat ban eangkat sareng rakyat..kuleh lok nyak banyak target 80 persen cokop...20 persen begi oreng

..kaule lambek pelean olle suara 80 persen..nekah kaule terro se sae terro sedemokratis..enggi pak klebun ban sedegeh rakyat”

“..Perkenalkan anak saya Ra Momon (Ra adalah Lora sebutan untuk anak Kyai) ..cucunya Kyai Amin. Kemudian memperkenalkan Calon Wakil Bupati Ra Mondir. Ra mondir ini adalah masih satu lingkungan (Keluarga) kakeknya Ra Mondir ini kakek saya juga..kedua orang ini orang saya semua orang dalam tapi sesuai prosedur..perkara ada orang lain yang mencalonkan diri (sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati) saya tidak akan menghalang- halangi ...diakhir Pidato Fuad Menyatakan “minta tolong di kasihani kepada rakyat semuanya...pilihann Bupati ini ditentukan oleh pilihan rakyat dan ditakdirkan oleh Gusti Allah Swt ...kuncinya dikasihani dan disenangi rakyat..didaulat dan diangkat oleh rakyat ..gak muluk muluk target saya mendapat suara 80 persen sudah cukup, 20 persennya untuk orang lain..saya dulu waktu pencalonan yang kedua melalui pilkada langsung dapat sekitar 80 persen ...saya ingin yang demokratis ..iya pak klebun? (klebun : kepala desa) dan semua rakyat yang hadir disini..”

Begitu pula kampanye yang dilakukan pihak Ra imam dengan Jargon Politik “Memajukan Desa, Menata Kota” yang videonya diunggah di You tube saat Deklarasi yang dihadiri puluhan ribu pendukungnya :

Seperti dijelaskan Bourdieu, posisi tertentu memiliki kekuasaan yang besar dari posisi lain tidak memiliki kekuasaan . sumber kekuasaan bisa diperoleh dari modal (Capital) berbeda dalam arena. Bourdieu menganalisis ada tiga sumber modal sumber kekuasaan yaitu modal ekonomi, sosial dan budaya . modal ekonomi (economic capital) merupakan sumber kekuasaan dari kekayaan materiil. Semakin banyak harta yang dimiliki , akan semakin besar kekuasaannya. Modal sosial (social capital) merupakan sumber kekuasaan yang diperoleh melalui jaringan (network) dan pengaruh sosial.

Sedangkan modal budaya (Cultural Capital) menunjuk pada cara seseorang merasakan dan mempersepsi sesuatu, menimbang baik dan buruk , boleh atau tidak. Bagi Bourdieu, Modal Budaya berbeda dari satu kelas ke kelas yang lain. Pada dimensi ini sumbangan orisinal Bourdieu, modal budaya beroperasi secara massif dalam menciptakan sistem hubungan posisi.

Melalui modal budaya inilah dominasi kelas – kelas direproduksi untuk menjaga sistem posisi dalam masyarakat. (Bourdieu,1990).

Praktik atau Praksis Pemilu Kepala Daerah

Bourdieu menggunakan metafora permainan dalam menyebut kehidupan sosial, metafora ini mengandung beberapa karakteristik diantaranya, Pertama. Semua permainan memiliki aturannya sendiri. Aturan itu menentukan apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kedua, permainan dipelajari melalui pengajaran secara eksplisit maupun secara eksperimental dan ketiga, permainan mempunyai tujuan

Metafora permainan ini digunakan bourdieu dalam kerangka untuk menjelaskan bahwa dunia sosial tidak dapat dipahami hanya semata- mata sebagai kumpulan perilaku individu atau hanya sebagai tindakan yang ditentukan oleh struktur. dunia sosial merupakan praktik sosial.

Seperti halnya metafora yang dikemukakan oleh bourdieu Pilkada sebagai ajang praktik agen atau elite politik mempunyai mekanisme aturan main dan tujuan- tujuan yang akan dicapai (Arizal Mutahir, Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu, Sebuah Gerakan Untuk Melawan Dominasi, Bantul, Kreasi Wacana, 2011 Hal : 61)

Proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

Penetapan pasangan calon (Paslon) Bupati dan calon Wakil Bupati Bangkalan, yang akan bersaing pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), berlangsung alot hingga Selasa Tanggal 23 November Tahun 2012 dini hari. Sebab, sebelum diplenokan, seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan harus mundur-mandir ke KPU Jawa Timur untuk konsultasi terkait persyaratan yang sudah dikirim oleh masing-masing kandidat.

Akhirnya, tiga pasangan yang sebelumnya sudah mendaftar ke KPU Bangkalan digedok (ditetapkan,Red) bisa bertarung 12 Desember nanti . Ketiga pasangan itu masing-masing KH Muhammad Makmun Ibnu Fuad dan Ir Mondir A Rofii (Makmur), pasangan KH Imam Buckhori Cholil dan Zainal Alim (ImamZen), serta pasangan Nizar Zahro dengan Zulkifli (Nikmat). "Sudah tuntas pleno penetapan calon sesuai jumlah pasangan yang sudah mendaftar ke KPU Bangkalan yakni tiga pasangan calon," ungkap Fauzan Jakfar usai memimpin rapat pleno pagi tadi.

Dijelaskan Fauzan, setelah penetapan pasangan calon ini, semua pasangan calon akan diundang untuk pengambilan nomor urut pada tanggal 24 Oktober nanti. Diakui Fauzan, jam penetapan pasangan calon meleset dari yang direncanakan semula, namun tidak sampai melampaui hari. Secara matematis, pasangan Makmur yang tumplek blek mendapat dukungan dari parpol parlemen, dipelopori oleh PKB dan PAN, diunggulkan. Itupun masih belum termasuk adanya dukungan dari parpol non parlemen, seperti Partai Kedaulatan, PKPB dan PSI, yang juga menyatakan siap untuk bergabung dalam memenangkan Makmur dalam Pilkada nanti.

Dalam berkas yang diserahkan ke KPU, untuk pasangan Makmur diusung oleh sebanyak 9 Partai yang mempunyai kursi di DPRD Bangkalan. Sementara, pasangan Imam Zen, hanya didukung oleh koalisi 2 parpol parlemen dan Nikmat mendapat dukungan dari 3 koalisi parlemen.

”Dukungan terhadap pasangan Makmur terus mengalir, sehingga bisa kami artikan kalau pasangan Makmur dikehendaki dan didukung oleh hampir seluruh lapisan masyarakat,” ujar humas tim pemenangan Makmur, H. Safiuddin Asmoro.

Klaim pasangan Makmur unggul, juga bisa dilihat dari siapa yang ada dibalik pasangan tersebut. Makmun Ibnu Fuad, yang kerap dipanggil Ra Momon, merupakan ‘Putera Mahkota’ dari Bupati Bangkalan saat ini, RKH. Fuad Amin Imron. Posisi calon wakil bupati Bangkalan, Mondir Rofii juga sangat istimewa. Sebab, selain merupakan Ketua DPC PKB Bangkalan, dengan perolehan 10 kursi parlemen, dia juga aktif sebagai Dewan Pendidikan setempat. Bahkan merupakan adik kandung dari wakil bupati Bangkalan saat ini, Syafik Rofii. ”Berdasar fakta politik yang ada saat ini, wajar saja kalau kami (Makmur) mematok target menang dalam satu putaran dengan perolehan 83% suara,” ungkap Safi.

Sementara pasangan Imam Zen, sangat mungkin bakal menjadi kuda hitam dalam Pilkada Bangkalan nanti. Mereka didukung oleh koalisi dua partai parlemen, PKNU – PPN, dengan perolehan kursi yang minimalis sebanyak 7 kursi saja. Modal sosial berupa jabatan Pengasung Pondok Pesantren (Ponpes) Ibnu Cholil, bisa menjadi mudah untuk menggaet pemilih, khususnya kalangan santri yang pernah ngalap berkah dan mondok di Ponpes yang bersangkutan.

Belum berbagai pengalaman yang lebih pada modal sosial dan keagamaan, seperti jabatan Ketua PCNU Bangkalan yang pernah dijabat, serta mantan anggota DPR RI dari Fraksi

PKB, menjadikan pria yang akrab dipanggil Ra Imam tersebut bisa sangat gampang untuk membuka komunikasi dengan segala segmen dan lapisan masyarakat. Terakhir, untuk pasangan Moh. Nizar Zahro – RH. Zulkifli (Nikmat) diusung koalisi PBR – PNBK dan Partai Republikan. Moh. Nizar Zahro, saat ini menjabat anggota DPRD Jawa Timur, sekaligus Ketua DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Jawa Timur. Sementara, calon wakil bupati, RH. Zulkifli merupakan anggota DPRD Bangkalan, sekaligus pengusaha dan Ketua Partai Republikan. (Surabaya Pos, Tanggal 23 Oktober 2012)

Dalam proses – proses pelaksanaannya, Kubu Ra Imam dan Din Zein menemui kendala PPD (Partai Persatuan Daerah) sebagai Partai yang kemudian berubah menjadi PPN mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya. PPD menggugat Berita acara Nomor 5/BA /X/2012 tanggal 22 oktober 2012 yang menetapkan KH Imam Buchori dan Zainal Alim, serta keputusan KPU Bangkalan Nomor 57 /Kpts / KPU-Kab /014-329656/2012 yang menetapkan Imam Buchori – Zainal Alim sebagai pasangan Nomor urut 1. Dalam proses sidang diputuskan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut.

Pengadilan Tata Usaha memenangkan gugatan Partai Persatuan Daerah . Putusan dibacakan pada tanggal 5 Desember 2012. Keesokan harinya tanggal 6 Desember 2012 KPUD menggelar konferensi pers yang intinya memutuskan untuk menerima putusan PTUN untuk mendiskualifikasi Ra. Imam – Din Zein karena didukung oleh PPN. Pendukung Ra. Imam – Din Zein langsung menanggapi dengan aksi demonstrasi di depan kantor KPUD sejak tanggal 7 Desember 2012 hingga 11 Desember 2012 yang diwarnai dengan perusakan fasilitas umum sebagai wujud protes serta bentrok dengan aparat keamanan.

Kuasa Simbolik

Menurutnya, bentuk simbolik memiliki kekuatan untuk menstrukturkan dan membentuk realitas justru karena ia sendiri terstruktur berdasarkan kondisi objektif realitas. Di sini ia memadukan pandangan pertama dan kedua. Selain itu bentuk-bentuk simbolik juga merupakan wilayah pertarungan, pergulatan, dan dominasi, karena masing-masing kelompok akan berusaha mendefinisikan dunia sosial sesuai kepentingannya. Di sini ia memasukkan juga cara pandang ketiga. Pun tak boleh dilupakan, karena dominasi dan kekuasaan ini dilakukan melalui bentuk

simbolik, maka sifatnya sebagai dominasi dan kekuasaan disalah-kenali dan diakui sebagai absah. Dan justru inilah yang menjamin efektivitasnya. (Bourdieu 1995a: 166-8).

Dengan mensintesis tiga tradisi ini, Bourdieu serentak mengatasi tiga dikotomi. *Pertama*, dengan menganggap bentuk-bentuk simbolik menstrukturkan dan sekaligus distrukturkan realitas, ia memadukan aspek aktif kesadaran dalam idealisme neo-kantian dan aspek pasifnya dalam materialisme dan strukturalisme. *Kedua*, ia memadukan penekanan pada integrasi dan konflik dalam masyarakat dengan menganggap bahwa bentuk-bentuk simbolik serentak memiliki dua fungsi: sosial dan politik, integrasi dan dominasi, unifikasi dan diferensiasi. Bentuk-bentuk simbolik menyatukan sebuah masyarakat dan juga memisahkannya menjadi kelas-kelas yang berbeda.

Justru adanya kesatuan yang memungkinkan konflik dan perbedaan (Bourdieu 1995a: 167). *Ketiga*, ia memadukan penekanan pada aspek material dan simbolik. Baginya, dua aspek dunia sosial ini berbeda namun tak terpisahkan. Tak ada bentuk material murni, karena semuanya dikenali agen melalui bentuk-bentuk simbolik. Pun sebaliknya, representasi simbolik yang dimiliki agen berakar pada benda-benda material. Ini terlihat, misalnya, pada pandangannya mengenai modal yang pluralistik, juga dalam pemikirannya tentang kelas yang tidak semata didasarkan pada distribusi modal material layaknya pandangan Marxis ortodoks tapi juga pada distribusi modal simbolik. Singkatnya, representasi simbolik agen terhadap realitas material tak kalah nyata dibanding realitas material itu sendiri (Bourdieu 1996: 483).

Di arena Pilkada ini analisa Bourdieu tentang kuasa simbolik menemukan titik relevansinya dimana aktor atau agen sebagai elite politik yang sedang berkontestasi mampu mempengaruhi kesadaran massanya atau dunia sosialnya dengan representasi simbolik salah satunya saat salah satu kandidat yaitu Ra Iman dan Din Zein dinyatakan tidak bisa mengikuti proses Pilkada karena terbentur persoalan teknis administratif yang mengakibatkan diskualifikasi sebagai kontestan Pilkada Kabupaten Bangkalan.

Ra Imam menyatakan dirinya akan golput seperti petikan wawancara dengan berita Koran Madura Rabu Tanggal 12 Desember 2012 beliau menyatakan “ Saya golput’ bagi saya Pilkada Bangkalan itu haram. Karena KPU telah mencederai proses demokrasi dan hak demokrasi saya termasuk juga hak pemilih dengan mendiskualifikasi saya tanpa payung hukum yang jelas”

Seperti dijelaskan salah seorang informan, Syaiful “ setelah Ra Imam menyatakan diri Golput maka pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012 Massa pendukung Iman- zein enggan datang ke TPS . mereka justru mendatangi kediaman Imam Buchori Cholil, calon Bupati yang didiskualifikasi KPU. Dirumah ini , Pro Imam –Zein menyerahkan surat Undangan dan kartu pemilih yang biasanya diserahkan kepada KPPS di masing-masing TPS.

Pro Imam –Zein yang mendatangi rumah Imam Buchori ini datang dari semua penjuru Bangkalan. Diantaranya mereka mengaku dari Desa jaddih Kecamatan Socah, Burneh, Sepuluh, Galis dan Kecamatan Kamal serta sebagian besar dari kecamatan kota Bangkalan. Para pro imam ini melakukan itu sebagai bentuk dukungan moral terhadap pasangan calon yang didiskualifikasi tersebut. Gelombang massa ini datang secara bergiliran mulai dari pagi hingga siang hari menjelang penutupan TPS pada Pukul 13.00 wib. Itu menandakan bahwa para pendukung Imam zein tetap setia meskipun kandidat yang diusungnya didiskualifikasi dalam Proses Pilkada ..” jelasnya.

Legitimasi modal budaya menjadi sangat penting bagi proses reproduksi – dominasi. Legitimasi inilah yang sering melahirkan kekerasan simbolis, yaitu kekerasan simbolis melalui praktik bahasa. Reproduksi dari sistem posisi melalui modal budaya bisa dipahami melalui praktik Habitus. Habitus bisa sebagai suatu sistem dari skema persepsi (pikiran dan tindakan) yang diciptakan oleh kondisi obyektif tetapi cenderung terus berlangsung walaupun ada perubahan – perubahan pada kondisi obyektif. Menurut Wallace , bagi bourdieu habitus adalah kunci dari reproduksi karena mendorong keteraturan dan keterulangan berbagai praktik yang menetapkan kehidupan sosial (Wallace & Wolf, 1995: 138)

Analisis terhadap habitus kemudian memanfaatkan analisis bahasa. Melalui bukunya *Language and Symbolic Power* (1992) , Bourdieu memperlihatkan bagaimana habitus muncul melalui praktik kompetensi bahasa dalam setiap field. Kompetensi bahasa bisa didefinisikan wewenang atau pengaruh untuk mengucapkan sesuatu.

Seperti yang dilakukan Pihak Momon dan Ra Mondir, Bupati Bangkalan meminta Warga Bangkalan tetap bersatu menjelang pelaksanaan Pilkada pada

Tanggal 12 Desember 2012 dan berharap Warga Bangkalan untuk menggunakan Hak pilihnya . semua tahapan Pilkada berjalan sesuai Jadwal yang ditetapkan KPUD Bangkalan . selain itu Fuad minta maaf atas ucapannya yang akan melakukan “Tindakan” jika pelaksanaan Pilkada ditunda, akibat ada aksi demonstrasi massa di kantor KPUD sebelumnya. Saat itu (8/12) kami khilaf hingga mengucapkan pernyataan yang merisaukan warga Bangkalan..”, Katanya

Fuad mengucapkan akan melakukan “Tindakan” jika pemilukada ditunda, ketika cuti sementara karena menjadi Juru kampanye, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Momon- Mondir, ia juga menyangkan adanya pemblokiran jalan raya oleh Pendukung pasangan calon Imam – Zein wawancara dengan Aditya

Hasil penghitungan suara yang diumumkan KPUD pada tanggal 17 Desember 2012 menetapkan pasangan calon nomor 3 Makmun Ibnu Fuad – Mondir Rofi’I sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara sah sebesar 505. 986 atau 93, 47 persen. angka golput dan suara tidak sah dalam Pilkada Bangkalan 2012 cukup tinggi. KPUD menyebutkan bahwa angka suara tidak sah sebanyak 41.719 suara. Suara tidak sah tersebut didominasi karena masyarakat pengguna hak suara tetap memutuskan untuk mencoblos Ra. Imam – Din Zein yang ditutup dengan stiker berwarna putih. Sedangkan angka golput mencapai 297.845 atau 33% dari jumlah DPT 880.928. Angka golput dan tidak sah ini bahkan mengalahkan suara yang didapat oleh pasangan Nizar Zahro – Dzulkifli yang hanya mendapat 35.378 suara.

Dalam kontestasi Pilkada memperebutkan posisi Bupati dan wakil Bupati ini berdasarkan keterangan informan tampak jelas Makmun Ibnu Fuad yang merepresentasikan Habitus ayahnya RKH Amin Fuan tampak unggul dalam ranah atau field dibandingkan kandidat yang lain. Field (lapangan) atau ranah adalah arena sosial orang – orang atau agen sosial menciptakan berbagai manuver, seperti permainan dalam game, menciptakan berbagai strategi dan perjuangan demi sumber daya yang diinginkan seperti dinyatakan Bourdieu “ lapangan dapat didefinisikan sebagai jaringan atau konfigurasi dari suatu jaringan obyektif diantara berbagai posisi..” (Bourdieu & Wacqant, 1992 : 97). Wallace dan Wolf. Pengertian Field atau ranah sebagai sistem posisi sosial yang terstrukturkan melalui relasi kuasa (Wallace & Wolf, 1995: 135) sesungguhnya arena menjelaskan hubungan dari berbagai posisi berbeda yang

ditentukan oleh perbedaan sumber kekuasaan. (Dalam Novri Susan, MA . 2009, Sosiologi Konflik dan Isu – Isu Konflik Kontemporer, Jakarta, Kencana Hal : 82)

Praktik politik dalam Pilkada yang menggunakan sumber- sumber kekuasaan dengan mengerahkan jaringan persekutuan yang bersifat oligarkis baik berdasarkan kekerabatan dan mesin politik yang melibatkan jajaran birokrasi tentu sangat mengabaikan prinsip – prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan akan berimplikasi pada mengedepannya kepentingan kelompok atau kepentingan oligarkisnya baik yang bersifat politik dan ekonomi.

Sementara kepentingan utama dari penyelenggaraan Pemilu yang demokratis adalah untuk menghasilkan pemimpin yang bersih berdasarkan atas suara dan kedaulatan rakyat serta mengemban kepentingan dan agenda publik.

Sehingga cita- cita diselenggarakannya kebijakan Otonomi daerah yang diartikan sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk berperan dalam menentukan tujuan kebijakan dan membuat keputusan pembangunan di daerah berdasarkan keperluan masyarakat setempat sebagai antitesis dari pelaksanaan pemerintahan yang sentralistik dan otoriter di era orde baru masih jauh dari harapan.

Kesimpulan

Pasca Reformasi seiring dengan diberlakukannya Politik Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia geliat politik lokal menampakkan ragam dinamika. Salah satu diantaranya adalah munculnya orang kuat di tingkat lokal dalam mengakses kekuasaan. Orang kuat lokal atau disebut pula dengan bos lokal (*bossism*) tumbuh bertebaran dengan memanfaatkan kran demokratisasi dan angin keterbukaan politik. Begitu pula yang terjadi di Madura. Bila di masa Orde Baru sangat sulit menemukan Bupati yang memiliki latar belakang dari Kiai.

Dengan adanya ruang yang lebih terbuka bagi figur lokal untuk berebut kursi kekuasaan di tingkat kabupaten maka kompetisi politik menjadi lebih dekat di tingkatan basis sosial masyarakat. Mereka yang memiliki kultur, jaringan dan modal sosial lainnya dapat lebih mudah untuk tampil kepermukaan. Tak terkecuali figure Kiai yang berasal dari habitus Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan di Pesantren dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Di Kabupaten Bangkalan Habitue Elite Politik berbasis Kiai bermuara pada Keturunan Bani Kholil yang berdiaspora dalam berbagai organisasi baik di eksekutif dan legislative serta organisasi kemasyarakatan.dan politik.

Seperti dijelaskan Bourdieu, posisi tertentu memiliki kekuasaan yang besar dari posisi lain tidak memiliki kekuasaan . sumber kekuasaan bisa diperoleh dari modal (Capital) berbeda dalam arena. Bourdieu menganalisis ada tiga sumber modal sumber kekuasaan yaitu modal ekonomi, sosial dan budaya . modal ekonomi (economic capital) merupakan sumber kekuasaan dari kekayaan materiil. Semakin banyak harta yang dimiliki , akan semakin besar kekuasaannya. Modal sosial (social capital) merupakan sumber kekuasaan yang diperoleh melalui jaringan (network) dan pengaruh sosial.

Trah Politik dan Dinasti Politik berhasil dibangun Oleh RKH Fuad Amin selama kepemimpinanya dua periode,10 tahun kemudian dilanjutkan oleh Kemenangan anaknya Makmun Ibnu Fuad dengan suara mayoritas 93,47 persen. Setelah saingan utamanya yang juga Keturunan Bani Kholil yaitu KH Imam Buchori Kholil gagal mengikuti kontestasi Pilkada.

Dalam kontestasi Pilkada di Kabupaten Bangkalan, kemampuan Kelompok atau Aktor Politik dalam menggunakan sumber - sumber Kapital dan kuasa simbolik dalam masyarakat yang masih bersifat Paternalistik sangat efektif dalam mengelola ruang Praktik. Dalam analisis Perspektif Agensi- Struktur Bourdieu, ruang sosial dan kelompok sosial yang menguasainya adalah produk dari perjuangan historis yang terus menerus diperbarui untuk memperebutkan atau meneguhkan dominasi dalam Kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Singarimbun, Masri. "Tipe, Metode dan Proses Penelitian", dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed). *Metode Penelitian Survey*. (Jakarta: LP3ES. 1984)
- Neuman, W.Lawrence. 2003 *Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches*, fifth edition (Boston: Pearson Education, Inc : 413-415. 2003)
- Deflem, Matheu. *Welfare, Political Leadership, and State Formation: The Case of The Zulu Kingdom, 1808-1879*, (Ethnology vol 38, no. 4, pp 371-391. autumn 1999)
- Simon, Marlin K. (Spring 2008), 'Building Leadership, Not Leaders', (book review dari Ulrich, D, & Smallwood, N. (2007). *Leadership Brand: Developing customer-focused leaders to*

- drive performance and build lasting value*. Boston: harvard Bussiness School Press)
Journal Of Leadership Studies Vol. 2 No. 1
- Renshon, Stanley A. 'Politicaal Leadership as Social Capital: Governing in Devided National Culture', (Political Psychology, Vol. 21 No. 1 2000)
- Nye Jr, Joseph S. *Soft Power*, (Public Affairs. 2004)
- Nye Jr. Joseph S. *The Power To Lead*, USA. (Yale University Press,2004)
- Ritzer, George & Goodman J Douglas. Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik sampai perkembangan mutakhir Teori Sosial Postmodern, (Yogyakarta : Kreasi Wacana.2008)
- Albrow, Martin, Max Weber's construction of social theory, (Hampshire : Macmillan, 1990)
- Suyanto, Bagong dan Sutinah (ed) 2010, Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan . Jakarta, Kencana.
- Bourdieu, Pierre, "The Philosophical Institution", terj. dari bahasa Prancis oleh Kathleen McLaughlin, dalam Alan Montefiore (Ed.), *Philosophy in France Today*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1983)
- Field, John. Modal Sosial, (Bantul : , Kreasi Wacana, 2010)
- Jenkins, Richard, *Pierre Bourdieu*, (London: Routledge: 1992).
- Wacquant, Loïc, "Toward a Reflexive Sociology: A Workshop with Pierre Bourdieu", (*Sociological Theory* Vol. 7, 1989)
- Wacquant, Loïc, "From Ruling Class to Field of Power: An Interview with Pierre Bourdieu on *La noblesse d'État*", (*Theory, Culture & Society* Vol. 10, 1993)
- Susan, Novri MA, Sosiologi Konflik dan Isu – Isu Konflik Kontemporer, (Jakarta, Kencana, 2009)
- Mutahir, Arizal. Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu, Sebuah Gerakan Untuk Melawan Dominasi, (Bantul : Kreasi Wacana, 2011)
- Ahmad Rifai, Mien, Manusia Madura, (Pembawaan, Perilaku, etos Kerja. Penampilan. Dan Pandangan Hidupnya, seperti Dicitrakan Peribahasanya),Jakarta, Pilar Media (Anggota IKAPI: 2007)
- Munir,Mutmainnah. Kiai Dan Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, Madura Dalam Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal (Jakarta, Pustaka LP3ES : 2005)

Nico Ainul Yaqin dkk, Sang pemimpin, 10 Tahun Kepemimpinan RKH Fuad Amin Imron,
(2012)

Leo Agustino. Dinasti Politik Pasca Orde Baru. (Jakarta : Prisma Vol 29. No 3 Juli, 2010)

Leo Agustino. Sisi Gelap Otonomi Daerah. (Jakarta : Widya Padjajaran, 2011)

Zamroni, M Imam, Kekuasaan Juragan Dan Kyai Di Madura, KARSA, Vol. XII No. 2 Oktober
2007

Umar Syadat Hasibuan, Ambang Batas Dinasti Politik, Kompas 11 April 2013

Kompas, 7 Desember, 2011

Kompas, 23 Februari, 2013

Surabaya Pos. tanggal 23, Oktober 2012

Kabar Madura, 8 Desember 2012

Koran Madura, 11 Desember 2012

Koran Madura, 12 Desember 2012